

TAJUK RENCANA

Memaknai Peringatan 79 Tahun Merdeka

BANGSA Indonesia baru saja merayakan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Usia Republik Indonesia bertambah satu tahun. Artinya sudah 79 tahun Bangsa Indonesia bebas, merdeka dari penjajahan kolonial. Kemerdekaan yang direbut dengan kerja keras serta darah para pahlawan dan syuhada. Bukan hadiah penjajah.

Perayaan untuk mengungkap kebahagiaan dan syukur atas karuniaNya. Kemeriahannya perayaan yang semoga tidak sekadar pesta pora tanpa makna. Perayaan yang semoga tidak melupakan masalah besar yang harus dihadapi pemerintahan ini di tahun depan : membayar utang yang jatuh tempo dan kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mengingat untuk IKN dalam RAPBN 2025 hanya disepakati Rp 143 miliar (batas bawah).

Yang berbeda dalam peringatan tahun ini ialah terwujudnya keinginan Presiden Joko Widodo yang diucapkan tahun lalu : *merayakan HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*. Sehingga di tengah kritikan ‘dipaksakan’ dan berbeaya lebih tinggi dan mencapai Rp 87 M dibandingkan di Jakarta tahun lalu Rp 53 M (KR, 14/8), upacara di IKN tetap dilangsungkan.

Meski demikian, upacara Detik-detik Proklamasi yang dipimpin Jokowi dan dihadiri presiden terpilih Prabowo Subianto tetap mengacu pada pelaksanaan di Istana Merdeka. Di Istana Merdeka dipimpin Wapres Ma’ruf Amin dan dihadiri wapres terpilih Gibran Rakabumingraka.

Melaksanakan upacara kemerdekaan di luar Jakarta atau di luar Istana Merdeka, bukanlah peristiwa pertama. Sejarah mencatat, peringatan pertama Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan, justru dilakukan di Halaman Gedung Agung Yogyakarta. Waktu itu terjadi Agresi Belanda, sehingga pemerintahan mulai presiden dan para Menteri mengungsi ke Yogyakarta. Baru tahun 1950, upacara HUT Kemerdekaan RI mulai dilaksanakan di Istana Merdeka. Tahun 1963, Presiden Soekarno memindahkan peringatan ke Gelora Bung Karno — zaman Orde Baru menjadi Stadion Senayan — yang diresmikan setahun sebelumnya. Namun setela-

lah itu dan bertahun kemudian kembali dirayakan di halaman Istana Merdeka. Dan baru Sabtu (17/8) kemarin dilaksanakan di IKN Nusantara Kalimantan Timur.

Dimana pun dirayakan, bangsa ini harus memahami bila peringatan HUT Kemerdekaan bukan sekadar seremoni. Akan menjadi bermakna perayaan ini dilakukan dengan menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai dasar yang menjadi nyawa Republik Indonesia. Artinya, tidak hanya berhenti di kulit luar, kesemarakan semata. Sehingga tidak perlu muncul ‘larangan berhijab’ bagi perempuan Anggota Paskibraka. Larangan yang dimaksud dimaksud Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi untuk keseragaman, justru mengingkari kebhinnekaan, keragaman Bangsa Indonesia. Apalagi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang dicantumkan dalam lambang negara Garuda Pancasila.

Maka pesan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam refleksi kemerdekaan *“Bangunlah jiwa Indonesia agar lahir Indonesia Raya yang beryawa,”* jadi memiliki makna. (KR, 18/8). Karena ‘Indonesia yang Beryawa’ yang dimaksud adalah Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagai tujuan dan cita-cita nasional yang digoreskan para pendiri negara. Membawa negara dan bangsa tercinta ini pada cita-cita luhurnya yang mulia. Sebagai kunci pemimpin sudah harus selesai dengan dirinya.

Peristiwa 17 Agustus 1945 bukan akhir, tapi awal perjalanan bangsa. Kini, dengan total penduduk mencapai 275,5 juta (BPS, 2020) harapan kehidupan adil sejahtera masih belum optimal terwujud. Bahkan Guru Bangsa Syafii Maarif (2012) memprihatinkan, sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu yatim piatu. Belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.

Harus diakui, sebagian sudah terpenuhi. Namun janji kemerdekaan sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD belum semua lunas. Miris, kini ada yang melenceng bahkan berjalan mundur. □f

NASIHAT dari sahabat Nabi Umar bin Khattab kepada sahabatnya yang berbunyi *“Hasibu anfusakum qabla an tuhaasabu”* yang kurang lebih maknanya hisablah diri kalian sebelum kalian hisablah melandasi latar-belakang tulisan ini. Pesan atau imbauan tersebut tentunya tidak hanya berhenti pada tataran hafal teks kalimatnya, melainkan dalam perspektif masa depan harus menjadi cermin besar kita agar tidak salah jalan dan tergulung dalam arus sejarah. Menimbang-nimbang, mengevaluasi, mengoreksi, mengkalkulasi diri pribadi sudah sejauh mana kontribusi kita dalam mengisi kemedekaan adalah salah satu cara efektif atau dalam tulisan ini penulis menamainya dengan “Muhasabah Kemedekaan”.

Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI 17 Agustus selalu diperingati dengan berbagai kegiatan masyarakat dengan penuh gegap gempita. Seremonial upacara kemerdekaan tampak sangat meriah dan khidmat ditambah aneka perlombaan beserta *ubo rampenya* mengiringi. Minimal dengan menyelenggarakan upacara bendera 17 Agustus di tempat masing-masing. Di tengah-tengah gegap gempitanya perayaan kemerdekaan tentunya kita tidak boleh lengah. Tahun 2045 yang kita gadang-gadang sebagai generasi emas apakah betul-betul akan tercapai. Artinya memiliki spirit karakter ke-Indonesiaan yang tangguh sehingga dapat menjadi gelombang penentu masa depan yang lebih cerah atau justru hanya akan menjadi buih yang kemudian tergulung oleh arus. Pada kesempatan ini kita harus mulai resah menimbang diri masing-masing kemudian bergumam dan bertanya dalam batin “apa yang sudah kita kontribusikan selama ini dalam mengisi kemerdekaan?.” Pertanyaan selanjutnya kemudian diikuti “apa yang sudah kita mulai siapkan untuk generasi mendatang. Bekal-bekal apa yang perlu disiapkan?

Dua Bekal

Paling tidak ada dua bekal yang perlu disampaikan kepada generasi

Muhammad Iqbal Birsyada

milennial, generasi mendatang di tengah-tengah arus teknologi yang amat deras. Pertama, bekal pendirian, keyakinan yang teguh diiringi dengan sikap percaya diri yang kokoh. Hal ini dapat dimaknai bahwa generasi mendatang harus memiliki pegangan hidup yang kuat. Bekal ini dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat melalui proses sosialisasi dan enkulturasi nilai,



etika, budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa bekal ini generasi masa depan akan amat rapuh dalam menghadapi berbagai problem dan tantangan hidup di masa yang akan datang.

John Gardner, seorang politisi sekaligus cendekiawan dari Amerika Serikat, pernah berkata *“No nation can achieve greatness unless it believes in something, an unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization.”* Di manapun tidak ada bangsa yang dapat mencapai tahapan puncak kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar (Latif, 2011). Pengajaran sekaligus praktek nilai, etika, moral dan

keagamaan dalam kehidupan sehari-hari adalah syarat utama yang perlu dipenuhi. Dengan bekal itu generasi mendatang benar-benar memiliki bekal, rambu-rambu yang diyakininya sehingga menjadi pendirian dan pegangan hidup di masa yang akan datang. Buah dari ini adalah generasi yang akan datang memiliki sikap dan mental percaya diri yang tangguh.

Bekal kedua adalah menanamkan sikap optimisme dan selalu berkontribusi nyata untuk masyarakat serta memiliki tanggungjawab moral sekecil apapun bagi bangsanya. Buah dari hal ini adalah generasi yang akan datang akan menjawab berbagai tantangan bangsa melalui karya dan kreativitas dalam bidang dan profesinya masing-masing. Mereka tidak akan menjadi buih atau guruh, melainkan akan menjadi gelombang yang ikut menentukan arus sejarah bangsa yang lebih baik dan mencerahkan. Generaasi seperti inilah yang sesuai dengan apa yang telah digambarkan dalam Alquran (QS. 13:17) bahwa mereka seperti air hujan yang jatuh ke bumi kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman hingga menjadi subur serta bertumbuh bunga-bunga yang indah.

Tentunya hal ini adalah PR besar bersama seluruh elemen Masyarakat dan bisa dimulai dari sekarang diri sendiri dan keluarga. Agama berpesan *“ibda’ bi nafsik”*. □f

***) Dr. Muhammad Iqbal Birsyada, M. Pd.** Dosen di FKIP Universitas PGRI Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSL, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langanan per bulan termasuk ‘Kedaulatan Rakyat Minggu’... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kaaya No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani .
Wartawan : H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Tumpuan Indonesia Emas pada Pilkada 2024

BILA kita iseng mengecek di media sosial, alih-alih positif justru kian banyak anak muda yang pesimis dan titik ekstremnya adalah munculnya tagar Indonesia (C)Emas 2045. Lalu masih adakah secercah harapan? Mari sejenak kita tarik benang merahnya pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan sebentar lagi.

Trend Global

Meski banyak makian atau cemoohan, banyak pula sikap optimistik. Di dalam psikologi positif, ini bagus. Namun sikap optimis juga harus seimbang dengan upayanya. Dalam khazanah politik, upaya signifikan hanya bisa dilakukan bila seseorang telah duduk di satu jabatan, khususnya kamar eksekutif. Mengapa? Karena eksekutif memiliki kewenangan terbesar yang bersentuhan dengan *civil society* (masyarakat sipil) sekaligus mempunyai perangkat paling komplit, bukan legislatif atau yudikatif. Jika presiden memiliki kementerian dan lembaga beserta seluruh jajarannya, gubernur serta walikota dan bupati pun memiliki kepala dinas beserta seluruh perangkat di daerah yang justru lebih bersinggungan langsung.

Lalu apa hubungan Indonesia Emas dengan daerah, bukankah itu adalah visi pemerintah pusat? Memang betul, namun sesungguhnya pemerintah pusat ibarat sebuah gedung adalah modal pondasi, sedang suksesi struktur kolom ke atas itu ada pada daerah. Barangkali barulah pemerintah pusat di ujungnya mempercantik dengan *finishing* (penyelesaian) atap yang indah, serta cat dinding yang elegan.

Dengan analogi sederhana ini, dapat dikatakan bahwa kunci keberhasilan visi Indonesia Emas bertumpu pada suksesi regulasi maupun program-program konkrit di daerah. Lalu siapa pelaku utamanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah pemimpinnya, kepala daerahnya. Maka kemudian bagaimana sosok kepala daerah tersebut mampu mengubah haluan kebijakan yang selama ini bisa dibilang pemburu *rente*

Riemas Ginong Pratidina

(banyak kepala daerah diterpa kasus korupsi) sehingga menyebabkan daerah mundur.

Tentu poin penting pertama dan yang utama adalah integritas, itu harga mati. Tapi tak cukup sampai di sana. Selain integritas, kepala daerah mampu mengolah terminologi global yang telah diadopsi oleh PBB sejak 2015 yakni SDGs (*Sustainable Development Goals* atau target Pembangunan berkelanjutan), yang menyangkut di dalamnya berbagai tema utama seperti isu kemiskinan, isu lingkungan, reduksi ketidakadilan (seperti keadilan gender dan disabilitas), yang muaranya adalah bagaimana keseriusan di dalam mengkonstruksi suatu *soft infrastructure* atau manusia. Belum lagi dalam pembangunan manusia, kepala daerah tidak boleh latah pada investasi pendidikan, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Bagaimana kepala daerah dapat peka terhadap potensi-potensi tersebut di daerahnya, untuk kemudian kita bukan sekadar mencari BJ Habibie baru tapi juga menargetkan mungkin *scientific discovery* (penemuan saintis) yang dimotori oleh putra daerah, atau minimal menumbuhkan satu kultur sains yang terejawantahkan dalam pikiran-pikiran kritis di masyarakat. Kendala selama ini adalah fokus pemerintah daerah yang berparadigma *hard infrastructure* seperti gedung dan jalan yang sarat permainan kotor.

Keseriusan visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kepala daerah yang cakap mengurai isu-isu tersebut, dan harus dimulai saat ini, karena suksesi suatu kebijakan sifatnya *long term* (jangka panjang), butuh waktu bertahun-tahun menimbang kemungkinan *error* dan gejala yang timbul dari sisi politik, hukum, sosial, maupun budaya.

Uraian di atas intinya adalah tumpuan terberat dan terbesar ada di kepala daerah. Namun satu hal yang perlu diingat di dalam model demokrasi bahwa sebelum sampai di sana, ada prosesi elektoral yang artinya penentu ada pada masyarakat sipil sendiri. Mau di bawa ke mana arah Indonesia ke depan, ditentukan oleh penggunaan hak suara kita di dalam bilik suara besok.

Celakanya menurut survei LSI, kecenderungan pola pragmatis pada pemilu Februari 2024 kemarin cenderung meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Artinya, keterpilihan elektoral ditentukan oleh seberapa besar uang yang diinvestasikan ke individu-individu yang berangkat menuju bilik suara. Dampaknya adalah visi luhur tadi kemudian tergerus oleh dinamika pragmatis dalam prosesi elektoral, yang efeknya adalah bukan hanya 5 tahun (berkaca pada analisis di atas) namun dapat melompat lebih jauh, bisa 10 bahkan 20 tahun. Jika ini terjadi secara masif di banyak daerah, akibatnya ketercapaian Indonesia Emas hanya menjadi slogan dan imajinasi belaka. □f

***) Riemas Ginong Pratidina,** anggota dan peneliti di LHKP (Lembaa Hikmah dan Kebijakan Publik) PWM DIY.

Pojok KR

Peringatan HUT ke-79 RI digelar bersamaan di IKN dan Istana Merdeka
-- **Tekad Prabowo Subianto, tahun depan di IKN**

Pemimpin harus sudah selesai dengan dirinya
-- **Agar tidak korupsi dan tidak membangun dinasti**

Lepas atlet paralimpic, Menpora sebut tak ada diskriminasi bonus
-- **Bukan hanya janji, perlu bukti**

Berabe